BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan penyetaraan jabatan di BKPSDMD Kota Makassar memiliki standar dan tujuan yang jelas, yaitu menyederhanakan struktur organisasi, meningkatkan efektivitas birokrasi, dan menciptakan sistem karier ASN yang berbasis kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dilandasi oleh visi peningkatan profesionalisme dan efisiensi ASN.

2. Sumber Daya

Meskipun belum tersedia anggaran khusus untuk implementasi kebijakan ini, BKPSDMD tetap mengoptimalkan anggaran rutin pengembangan SDM. Sumber daya manusia cukup responsif, walaupun masih memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan terbatas. Sarana dan Prasaran masih belum merata namun masih bias dimaksimalkan dalam bekerja.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi dan komunikasi antara BKPSDMD dengan instansi pusat seperti KemenPAN-RB dan BKN serta instansi daerah telah dilakukan secara aktif. Hambatan birokrasi dan perbedaan persepsi berhasil diatasi dengan penggunaan media komunikasi yang efektif dan pertemuan langsung. Internal organisasi juga aktif melakukan edukasi kepada pegawai untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

BKPSDMD telah menunjukkan kesiapan struktural dan individual dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Penyesuaian struktur, evaluasi kinerja, dan pemetaan jabatan menjadi langkah konkret dalam proses adaptasi. Pegawai juga menunjukkan tingkat adaptasi yang cukup baik meskipun menghadapi tantangan dalam transisi ke pola kerja berbasis fungsional. Implementor memberikan respon yang baik namun masih perlu melakukan pendampingan.

5. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap implementor yang masih hati-hati dan cenderung lambat namun terbuka dalam menerima masukan dan saran. Sikap pegawai terhadap kebijakan cukup beragam. Meskipun awalnya terdapat resistensi karena perubahan peran dan kekhawatiran terkait karier, dengan adanya pelatihan dan pendekatan persuasif,

sebagian besar pegawai mulai memahami dan mendukung kebijakan ini.

6. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan sempat menghadapi tekanan dari pihak luar, seperti politisi dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, BKPSDMD tetap menjaga independensi kebijakan berdasarkan prinsip meritokrasi. Budaya kerja yang adaptif dan kepatuhan terhadap aturan pusat menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran implementasi. Permutasian pegawai karena politik menjadi lebih ketat serta adanya efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional di BKPSDMD Kota Makassar berjalan cukup efektif meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dukungan internal organisasi, koordinasi lintas instansi, dan komunikasi yang intensif menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan kebijakan ini.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Alokasi Anggaran Khusus

Pemerintah Kota Makassar perlu mempertimbangkan pengalokasian anggaran khusus untuk mendukung kebijakan penyetaraan jabatan ini, terutama dalam penyediaan pelatihan dan pembinaan teknis secara menyeluruh bagi ASN yang terdampak.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai

BKPSDMD diharapkan dapat terus menyelenggarakan pelatihan dan asesmen kompetensi secara berkala agar pegawai mampu menjalankan jabatan fungsional secara optimal sesuai keahliannya.

3. Sosialisasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan agar seluruh pegawai memahami tujuan dan manfaat kebijakan secara menyeluruh. Pendampingan selama masa transisi juga penting untuk mengurangi kebingungan atau kecemasan di kalangan ASN.

4. Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

BKPSDMD perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, baik dari sisi administratif maupun kinerja

fungsional, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

5. Penguatan Komunikasi Lintas Instansi

Agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal, komunikasi dengan instansi pusat dan daerah lain harus terus ditingkatkan. Penggunaan teknologi informasi juga perlu dimaksimalkan untuk mendukung proses koordinasi dan dokumentasi kebijakan.

Dengan berbagai langkah perbaikan dan optimalisasi tersebut, diharapkan implementasi penyetaraan jabatan di BKPSDMD Kota Makassar ke depan dapat semakin efektif dalam mewujudkan ASN yang profesional, bersih, dan kompetitif.

C. Produk Tesis

Produk dari penelitian ini berupa ***Policy Brief*** yang berjudul *"Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi: Implementasi Penyetaraan Jabatan Pengawas di BKPSDM Kota Makassar." Policy brief* ini disusun sebagai bentuk rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis dan strategis, berdasarkan temuan utama dari hasil penelitian terkait implementasi penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional di lingkungan BKPSDM Kota Makassar. Produk ini bertujuan untuk memberikan masukan yang konkret dan aplikatif kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, khususnya:

1. **Wali Kota Makassar**, selaku pengambil kebijakan tertinggi di tingkat pemerintah daerah;
2. **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar**, sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah yang berkaitan dengan tunjangan dan pengelolaan kepegawaian;
3. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar**, sebagai pelaksana utama dalam manajemen kepegawaian dan pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan.

Policy brief ini menyajikan rangkuman permasalahan, analisis singkat terhadap tantangan dan dampak dari kebijakan penyetaraan

jabatan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Dengan adanya penyetaraan jabatan pengawas kedalam jabatan fungsional, diharapkan Pemerintah Kota Makassar, melalui instansi terkait, dapat mengambil langkah-langkah strategis yang berkelanjutan dalam rangka mendorong birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap tuntutan reformasi serta kebutuhan pelayanan publik.